

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinay al-Islamy*, ctk. Pertama, Daar al-Kitab, Beirut, 2011.
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Penerbit Universitas Trisakti Jakarta, 2010.
- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ctk. Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, ctk. Pertama Ghalia Press, Jakarta, 2004.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, ctk. Pertama, Ghalia Press, Jakarta, 2004.
- Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, ctk. Keempat, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.
- Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, ctk. Kedua, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2006.
- Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994, hlm. 112.
- I Gusti Ngurah Parwata, *Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*, ctk. Pertama, Universitas Udayana, Denpasar, 2017.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, ctk. Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Jenia I Turner, *Plea bargaining Across Borders: Criminal Procedure Law across borders*, Aspen Publishers, 2009.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Ketiga Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Alumni, Bandung, 2012.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, ctk. Pertama, Alumni, Bandung, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ctk. Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, ctk. Keenam, Jakarta, 2010.
- Romli Atmasasmita & Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*, ctk Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta 2016.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, ctk. Pertama, Ghalia Indah, Jakarta, 1983.
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2021.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ctk. Keempat, Raja Grafindo, Jakarta, 1995.
- Tenriawaru, dkk. *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain Vs Restorative Justice)*, Penerbit Adab, Indramayu, 2022.

Jurnal

- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, ctk. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, 2016.
- Ahmad Wardi Muclish, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Andi Muhammad Thoriq, "Tinjauan Viktimologi dan Kriminologi Terhadap Penyalagunaan Ganja di Indonesia", *IPMHI Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2022.
- Andrea Kupfer Schneider dan Cynthia Alkon, "Bargaining In The Dark: The Need For Transparency And Data In Plea Bargaining", *New Criminal Law Review University of California*, Edisi No. 4 Vol 22, 2019.
- Ario Ponco Wiguna, "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan", dalam *Jurnal Ilmu Hukum Opinion*, Edisi No.1 Vol. 1, 2013.
- Asher Flynn dan Kate Fitz-Gibbon, "Bargaining with Defensive Homicide Examining Victoria's Secretive Plea Bargaining System Post-Law Reform", *Melbourne University Law Review*, 2011.
- Choky. R. Ramadhan, "Peningkatan Efisiensi Peradilan Melalui Mekanisme Jalur Khusus dalam RUU KUHP", *Media Hukum dan Keadilan Teropong*, Vol.1, 2014, hlm. 150.
- Dheny Wahyudhi, Sri Rahayu, Elly Sudarti, dan Herry Liyus, "Prinsip Plea Bargaining dalam Penyelesaian Perkara Pidana Secara Cepat Sederhana dan

- Biaya Ringan dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Edisi No. 2 Vol, 6, 2022.
- Duwi Handoko, “Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya,” *Menara Ilmu*, Edisi No.3 Vol.12, 2018.
- Francis Jr. Awisan, dkk, “Primer on Plea Bargaining in Drug Cases”, *De La Salle University Manila*.
- Graham Hughes, “Pleas Without Bargains”, *Journal Rutgers Law Review*, Edisi Vol. 33, 1980- 1981.
- Ichsan Zikry, ”Gagasan Plea Bargaining System Dalam RCUHAP dan Penerapan di Berbagai Negara”, *Jurnal Hukum*, 2014.
- Kukuh Dwi Kurniawan, Dwi Ratna Indri Hapsari, dan Izza Enggar Prasetya, ”Pemberlakuan Plea Bargaining System Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Untuk Tujuan Menyelesaikan Konflik” *Jurnal Jurisprudence Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Edisi No.2 Vol. 10, 2020.
- Lanang Kujang Pananjung dan Nevy Nur Akbar, ”Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia”, *Recidive*, Edisi No. 3 Vol. 3, 2014.
- Lucian E. Dervan. “Bagained Justice: The History and Psychology of Plea Bargaining and the Trial Penalty ”. *Federal Sentencing Reporter*, Belmont University College of Law Research Paper, Edisi No. 4-5 Vol. 31, 2019.
- Mahrus Ali, Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum), *Jurnal Hukum UII*, Edisi No.2 Vol.15, 2008.
- Marfuatul Latifah, “Pengaturan Jalur Khusus Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana”, *Negara Hukum DPR RI*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2014.
- Máximo Langer, “Plea Bargaining, Trial-Avoiding Conviction Mechanisms and the Global Administratization of Criminal Convictions”, *UCLA School of Law Public Law Research Paper University of California*, 2019. DOI: [10.1146/annurev-criminol-032317-092255](https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-032317-092255).
- Ni Putu Tya Suindrayani, ”Aplikasi Konsep Plea Bargaining: Perspektif Perkara Narkotika”, *Jurnal Kertha Patrika Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Edisi No.3 Vol. 44, 2022.
- Rinto Wardana, “The Plea Bargaining System as a Criminalization Model unter The Law Number 19 Year of 2016 on Electronic Information and Transaction Act and The Dignified Justice”, *Global Legal Review Universitas Pelita Harapan*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2021.

- Ruchoyah, "Urgensi Plea Bargaining System dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perbandingan Plea Bargaining System di Amerika Serikat", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Edisi No.2 Vol. 27, 2020.
- Rusli Muhammad, "Pengaturan Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Edisi No. 2 Vol 2, 2015.
- Sahat Maruli Tua Situmeang, Diah Pudjiastuti, dan Subagyo Sri Utomo, "Plea Bergaining System sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Indonesia", *Res Nullius Law Journal Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, Edisi No.2 Vol. 6, 2024.
- Tasya Nafisatul Hasan dan Marli Candra, "Tinjauan Viktimologi Terhadap Hak Perlindungan Penyalahgunaan Narkotika (Victimless Crime)" *Pampas: Journal Of Criminal*, Edisi No. 2, Vol 2, 2021.

Aturan Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lambaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- Departemen Circular No. 003 Clarificatory Guidelines On Plea bargaining For Republic Act No. 9165, Otherwise Known As The "Comprehensive Dangerous Drugs Act Of 2002*

Penelitian

- Aby Maulana, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perumusan Plea bargaining System Pada Pembaruan Peradilan Pidana Indonesia*, Disertasi Program Studi Doktor Universitas Trisakti, Jakarta, 2019.

- Adri Pribadi Harapan, *Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Tanpa Korban (Victimless Crime) (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2011-2014)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.
- Banan Prasetya, *Rekonstruksi Regulasi Penerapan Plea bargaining dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi Program Doktor Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.
- Choky R. Ramadhan, *Pengantar Analisis Ekonomi Dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*, ICJR, Paper, Jakarta, 2016.
- Munazir, *Hukuman Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Analisis Menurut Prespektif Hukum Islam)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019.
- Primanita Aisy N.H, *Meningkatkan Pemahaman Siswa Tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Layanan Informasi Pada Siswa Kelas Viii Di Smp Negeri 34 Semarang Tahun Ajaran 2015/2016*, Skripsi Program Studi Bimbingan Dan Konseling Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2016.

Internet

- Anang Iskandar, "Seandainya Saya Jadi Presiden (Seri-12) Rehabilitasi Itu Hak. Biaya Rehabilitasi Ditanggung Negara. Relapse Untuk Ke 2 Kalinya Biaya Rehabilitasi Ditanggung Sendiri," terdapat dalam <https://www.instagram.com/p/DCOWN4OTABd/?hl=en>, Diakses terakhir tanggal 28 November 2024.
- Anang Iskandar, "Seandainya Saya Jadi Presiden (Seri-14) Tidak Perlu Langkah Represif, Penyalag Guna Itu Orang Sakit Cukup Direhabilitasi Tanpa Menghukum Pidana," terdapat dalam <https://www.instagram.com/p/DCUWRjJT17t/?hl=en>, Diakses terakhir tanggal 28 November 2024.
- Anang Iskandar, "Seandainya Saya Jadi Presiden (Seri-17) Pengguna Narkotika Jangan Dimasukkan Ranah Pidana Kalau Dipenjara Negara Rugi Dan Tidak Selesaikan Masalah," terdapat dalam <https://www.instagram.com/p/DCb2wLlTywC/?hl=en>, Diakses terakhir tanggal 28 November 2024.
- Anang Iskandar, "Seandainya Saya Jadi Presiden (Seri-20) Indonesia Membutuhkan Waktu 100 Tahun Agar Bebas Dari Penyalahgunaan Narkotika," terdapat dalam <https://www.instagram.com/p/DCjWf9HTIAf/?hl=en>, Diakses terakhir tanggal 28 November 2024.

- Anang Iskandar, "Seandainya Saya Jadi Presiden (Seri-30) Penyalah Guna Narkotika Wajib di Rehabilitative Justice Bukan di Restorative Justice," terdapat dalam <https://www.instagram.com/p/DDUpvUtTVfb/?igsh=YzAyMDM1MGJkZA==>, Diakses terakhir tanggal 28 November 2024.
- Amnesty International, *Philippines: Coercion and abuse disguised as "rehabilitation" at drug detention centres* terdapat dalam <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/11/philippines-coercion-and-abuse-disguised-as-rehabilitation-at-drug-detention-centres/>. 28 November 2024. Diakses tanggal 22 April 2024.
- Azizah, *Ketua MA Nyatakan Tahun 2021 Merupakan Tahun Terbaik Sepanjang Sejarah Berdirinya Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Perkara* terdapat dalam <https://mahkamahagung.go.id/id/berita/5096/ketua-ma-nyatakan-tahun-2021-merupakan-tahun-terbaik-sepanjang-sejarah-berdirinya-mahkamah-agung-dalam-penyelesaian-perkara>. 22 Februari 2022. Diakses tanggal 16 Agustus 2024.
- Azizah, *Sepanjang 2022 Mahkamah Agung Berhasil Memutus Perkara Sebanyak 28.024 Perkara* terdapat dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5667/sepanjang-2022-mahkamah-agung-berhasil-memutus-perkara-sebanyak-28024-perkara>. 23 Februari 2023. Diakses tanggal 16 Agustus 2024.
- Bagus Ahmad Rizaldi, *Kemenkumham: 52,97 Persen Penghuni Penjara dari Kasus Narkoba* terdapat dalam [Kemenkumham: 52,97 persen penghuni penjara dari kasus narkoba - ANTARA News](https://www.antaranews.com/berita/5297-persen-penghuni-penjara-dari-kasus-narkoba). 23 April 2024. Diakses tanggal 16 Agustus 2024.
- Handar Subhandi Bakhtiar, *Jaksa sebagai Dominus Litis: Pelengkap atau Pengendali Perkara* terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-sebagai-dominus-litis--pelengkap-atau-pengendali-perkara-lt67ae2a19a56bc/>. 14 Februari 2025. Diakses tanggal 19 Mei 2025.
- Irfan Kamil dan Sabrina Asril, *Ditjen HAM Sebut 60 Persen Tahanan di Indonesia Terkait Kasus Narkotika* terdapat dalam [Ditjen HAM Sebut 60 Persen Tahanan di Indonesia Terkait Kasus Narkotika \(kompas.com\)](https://www.kompas.com/berita/2023/03/31/ditjen-ham-sebut-60-persen-tahanan-di-indonesia-terkait-kasus-narkotika). 31 Maret 2023. Diakses tanggal 16 Agustus 2024.
- Kiki Safitri dan Ardito Ramadhan, "Wamenkum: Menyedihkan, Pengguna Narkotika Hanya 0,2 Gram Harus Dipenjara," terdapat dalam [Wamenkum: Menyedihkan, Pengguna Narkotika Hanya 0,2 Gram Harus Dipenjara](https://www.wamenkum.go.id/berita/wamenkum-menyedihkan-pengguna-narkotika-hanya-02-gram-harus-dipenjara), Diakses terakhir pada 02 Februari 2025.
- Mulia Budi, *Peneliti Temukan Lapas di RI Over Kapasitas, Terbanyak Napi Narkotika* terdapat dalam [Peneliti Temukan Lapas di RI Over Kapasitas](https://www.republika.co.id/berita/2024/08/16/peneliti-temukan-lapas-di-ri-over-kapasitas-terbanyak-napi-narkotika),

[Terbanyak Napi Narkotika \(detik.com\)](#). 21 September 2022. Diakses tanggal 16 Agustus 2024.

Nadia Putri Rahmani, MA: *Kinerja Penanganan Perkara di 2023 Lampau Target* terdapat dalam [MA: Kinerja penanganan perkara di 2023 lampau target - ANTARA News](#). 20 Februari 2024. Diakses tanggal 16 Agustus 2024.

Nafiatul Munawaroh, *Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis* terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--%20sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>. 20 Juni 2024, Diakses pada tanggal 04 Desember 2024.

Sheena Chestnut Greitens, *Terrorism in the Philippines and US-Philippine Security Cooperation* terdapat dalam Washington, DC Brookings Institute, 2017. <https://www.brookings.edu/articles/terrorism-in-the-philippines-and-u-s-philippine-security-cooperation/>. Diakses tanggal 22 Desember 2024.

Lain-lain

Alkostar Artidjo, "Kebutuhan Responsifitas Hukum Acara Pidana dan Dasar pertimbangan Pemidanaan serta judicial Immunity", Makalah *Rakernas MA*, 2011.

Andri Junjuran dan Teddy Lesmana, "The Concept of Plea Bargaining in The Settlement of Narcotic Crime", dalam Prosiding *Konferensi Internasional tentang Hukum Kebijakan Publik, dan Hak Asasi Manusia (ICLaPH 2023)*, Universitas Nusa Putra, Fakultas Hukum juga Fakultas Bisnis dan Humaniora, Jawa Barat, 2024.

Angkasa, "Bahan Presentasi Mata Kuliah Viktimologi", *Universitas Jendral Soedirman*, Surabaya, 2012.

